

**PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR DI DINAS
SOSIAL KOTA PALEMBANG TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana
S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**RETIYA SUSANTI
07011181823008**

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas
Sosial Kota Palembang Tahun 2020”**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

RETIYA SUSANTI

07011181823008

Pembimbing I

I. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

Tanda Tangan



Tanggal

17

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si

NIP. 198106082008122002



**28/2022
16**



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR DI DINAS SOSIAL KOTA
PALEMBANG TAHUN 2020”**

**Skripsi
Oleh :
RETIYA SUSANTI
07011181823008**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Juli 2022**

Pembimbing :

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

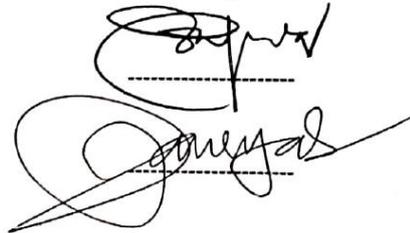
Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003
2. Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005

Tanda Tangan



Mengetahui,


Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Retiya Susanti
NIM : 07011181823008
Tempat dan Tanggal Lahir : Seleman, 07 Juni 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Inderalaya, 05 Juli 2000

Yang membuat pernyataan,



Retiya Susanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Tidak ada kata terlambat untuk berubah,
jika mereka bisa mengapa kita tidak”
(Retiya Susanti)**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tua, Ayahanda Suparyadi dan Ibunda Hailah**
- 2. Adik Riski Apriyadi**
- 3. Keluarga besar Alm. Busturi dan Alm. Ibrahim**
- 4. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Publik**
- 5. Orang terdekat, Sahabat dan Teman-teman Administrasi Publik 2018**
- 6. Almamater Universitas Sriwijaya**

ABSTRAK

Sarana dan prasarana aparatur merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan dan menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai untuk mencapai tujuan suatu instansi. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori pengelolaan keuangan menurut Ahmad Yani memiliki tiga dimensi yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, serta pertanggungjawaban keuangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020 karena masih ditemukan beberapa kendala, berarti belum maksimal dalam dimensi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan. Penelitian ini menyarankan agar membuat SOP program dan memperhatikan sistem pengarsipan SOP yang lebih teratur, memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efisien, dan membentuk tim khusus dari pihak internal dinas dalam pemeriksaan keuangan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Anggaran, Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembimbing I



Sofvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Juli 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Apparatus facilities and infrastructure are crucial factors in supporting the implementation and ensuring the smooth running of employees' work activities to achieve the agency's goals. Therefore, it is required to manage adequate facilities and infrastructure. This study aims to determine the Budget Management of the Apparatus Facilities and Infrastructure Improvement Program at the Dinas Sosial Kota Palembang (Palembang Social Agency). The qualitative was used as the study method, and it was based on the results of interviews, observations and documentation. The theory employed in this study is Ahmad Yani's financial management theory, which comprises three aspects: planning and budgeting, financial implementation and administration, and financial accountability. This study's finding concludes that the Budget Management of the Apparatus Facilities and Infrastructure Improvement Program at the Social Service of Palembang City in 2020 has not been optimized in terms of planning, budgeting, implementation, administration, and financial accountability because there are still some obstacles. This study suggests creating the program's SOP and maintaining a more regular SOP filing system, using the available budget efficiently, and forming a dedicated team from the agency's internal for financial audits.

Keywords: *Financial management, Budget, Apparatus facilities and infrastructure*

Advisor I



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

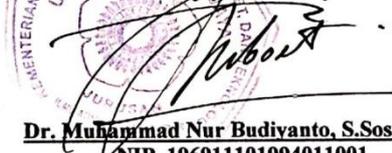
Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, July 2022

**Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University**



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis telah diberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis turunkan dan sanjungkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari Zaman Jahiliyah menuju Zaman Islamiyah seperti saat ini.

Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020”**. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus sebagai salah satu syarat untuk Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendoakan, membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan tanpa mengurangi rasa hormat ucapan ini penulis berikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Suparyadi dan Ibunda Hailah yang selalu memberikan dukungan moril dan materil yang sangat luar biasa terhadap kesuksesan penulis, tak lupa juga untuk adik saya yang sangat saya banggakan Riski Apriyadi, dan kepada keluarga besar Alm. Busturi dan Alm. Ibrahim serta orang terdekat yang telah memberikan support kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus. M. Sobri, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan dan waktu dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai akhir.
7. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan waktu dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal sampai akhir.
8. Seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
9. Pimpinan dan staf di Dinas Sosial Kota Palembang yang telah membantu selama proses penelitian.
10. Keluarga Besar Ikatan Kerukunan Mahasiswa Baturaja (IKMB)
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 18 jurusan Administrasi Publik Fisip Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi Kantor Dinas Sosial Kota Palembang, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Indralaya, 13 Juli 2022
Penulis



Retiya Susanti
NIM. 07011181823008

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
B. Kenangan Negara	9
C. Pengelolaan Anggaran	10
D. Anggaran	15
E. Sarana dan Prasarana	16
F. Teori yang digunakan	17
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Definisi Konsep	25
C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Informan Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Keabsahan Data	31
H. Teknik Analisis Data	31
I. Sistematika Penulisan	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palembang.....	35
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palembang	36
3. Nilai-Nilai Organisasi.....	38
4. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	39
5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang.....	47
6. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kota Palembang.....	48
B. Pembahasan	48
1. Dimensi Perencanaan dan Penganggaran.....	49
2. Dimensi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan.....	65
3. Dimensi Pertanggungjawaban Keuangan.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020.....	7
Tabel 1. 2 Laporan Anggaran Perkegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020.....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	7
Tabel 4. 1 Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jenis Kelamin di Dinas Sosial .	7
Tabel 4. 2 PNS Berdasarkan Golongan.....	7
Tabel 4. 3 Rincian Rencana Anggaran Perkegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020	7
Tabel 4. 4 Perubahan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020.....	7
Tabel 4. 5 Laporan Anggaran Perkegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020.....	7
Tabel 4. 6 Matrik Temuan Hasil Penelitian	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 4. 1 Dinas Sosial Kota Palembang	7
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang.....	7
Gambar 4. 3 SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja).....	7
Gambar 4. 4 SOP Pengajuan Langsung (LS) Pihak Ke-3	7
Gambar 4. 6 Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palembang.....	7
Gambar 4. 7 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020.	7
Gambar 4. 8 Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020	7
Gambar 4. 9 Mobil Dinas Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang.....	7
Gambar 4. 10 Motor Dapur Lapangan Dinas Sosial Kota Palembang	7
Gambar 4. 11 DPPA Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020.....	7
Gambar 4. 12 SIMDA.....	7
Gambar 4. 13 SIMDA Dinas Sosial Kota Palembang.....	7
Gambar 4. 14 Laporan Kinerja (LKJP) Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020 ...	7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Penunjukan Pembimbing Skripsi	97
Lampiran 2 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Skripsi.....	98
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian	100
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	101
Lampiran 5 Surat Persetujuan Izin Penelitian	102
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I.....	103
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II	104
Lampiran 8 Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi.....	105
Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	106
Lampiran 10 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II	107
Lampiran 11 Pedoman Wawancara.....	108
Lampiran 12 Form II Dosen Pembimbing I	111
Lampiran 13 Form II Dosen Pembimbing II	112
Lampiran 14 Form II Dosen Penguji I.....	113
Lampiran 15 Form II Dosen Penguji II	114
Lampiran 16 Peraturan-peraturan.....	115
Lampiran 17 Dokumentasi Wawancara.....	174

DAFTAR SINGKATAN

AKK	: Anggaran Khusus Kelurahan
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BAPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BUMDES	: Usaha Milik Desa
CALK	: Catatan Atas Laporan Keuangan
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA	: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPDR	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GU	: Ganti Uang
KABAN	: Kepala Badan
KAT	: Komunitas Adat Terpencil
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KUA PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara
LS	: Langsung
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
PERDA	: Peraturan Daerah
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RI	: Republik Indonesia
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah daerah
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SBU	: Standar Biaya Umum
SEKBAN	: Sekertaris Badan
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPD	: Surat Penyediaan Dana
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPP- GU	: Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
SPP-LS	: Surat Pemintaan Pembayaran Langsung
SPTJB LS	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja langsung
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah daerah
TNT	: Transaksi Non Tunai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah memiliki harapan bahwa peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, kehidupan demokrasi dan tercapainya efektivitas keuangan pada unsur-unsur pemerintahan. Salah satu hal penting dalam Otonomi daerah adalah keuangan daerah. Masalah ini dikarenakan peran keuangan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya otonomi daerah yang mengatur mengenai perimbangan keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Pemerintah Daerah memiliki kebebasan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, setiap daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk merencanakan dan mengatur sendiri Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus bertumpu pada kepentingan umumnya itu tidak hanya dilihat dari besarnya porsi anggaran untuk kepentingan umum, tetapi sejauhmana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan keuangan daerah.

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 adalah :

1. Menurut peraturan, dana daerah dikelola dengan tertib, memastikan kepatuhan, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta memastikan manfaat bagi masyarakat.
2. Diamanatkan oleh peraturan daerah setiap tahun bahwa APBD digunakan untuk menangani keuangan daerah yang merupakan sistem yang terintegrasi.

Peraturan pemerintah tersebut di atas juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan menguntungkan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Yani (2013), pengelolaan keuangan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Penggunaan anggaran pada suatu instansi pemerintah tentunya akan selalu terdapat sistem manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga dalam proses penyusunannya diperlukan data dan informasi yang terperinci untuk dijadikan sebagai bahan acuan, dikarenakan data dan informasi tersebut akan mempengaruhi keakuratan dalam proses perencanaan anggaran. Dalam proses perencanaan anggaran setiap instansi pemerintah diawali dengan menyusun dan menetapkan rencana kerja anggaran dan program-program yang akan dilaksanakan dalam setahun. Dalam penetapan rencana kerja harus disertai dengan menetapkan tujuan, yang mana tujuan ini akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan atau dasar evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan. Pada proses perencanaan baik dalam perencanaan kerja anggaran dan program membutuhkan manajemen yang mumpuni agar dalam perencanaan dapat menghasilkan program dan kegiatan sesuai dengan pelayanan yang

dibutuhkan oleh instansi tersebut. Selain dari sisi manajemen, sarana dan prasarana juga merupakan hal penting dalam proses perencanaan yang mana dengan sarana dan prasarana yang baik dapat juga mendukung kelancaran kinerja manajemen.

Dinas Sosial Kota Palembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang berlandaskan Peraturan Walikota Palembang No.51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palembang. Pada tahun 2020 terdapat sepuluh program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palembang yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan sistelpelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
7. Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial
8. Program pembinaan anak terlantar
9. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
10. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Dalam mendukung terlaksananya program sudah pasti memerlukan sarana dan prasarana seperti logistik, peralatan, guna mendukung program yang optimal. Dalam pengadaan sarana dan prasarana di instansi pemerintah bersifat kompleks, karena berkaitan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa. Hal tersebut didukung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan pasal 1 bahwa pengadaan barang

jasa ialah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi dengan proses dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan. Dengan demikian, diharapkan agar penggunaan baik APBN dan APBD agar dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien, prioritas penerapan prinsip kompetisi bisnis yang sehat, transparansi dan adil dalam menganggarkan pengadaan barang dan jasa.

Penelitian terkait dengan sarana dan prasarana sudah banyak diteliti, namun sebagian besar menggunakan fokus penelitian mengenai, pengaruh, evaluasi, efektivitas dan pengukuran kinerja. Penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan yang signifikan pada fokus dan lokus penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rismawati and Rafiie mengenai Analisis Sarana dan Prasarana dalam Efektivitas Kerja Pegawai Pada kantor Kecamatan Johan Pahlawan yang berada di kabupaten Aceh Barat. Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaan penelitian ini terkait dengan fokus penelitian mengenai aspek pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran merupakan suatu kegiatan yang diawali perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pencatatan anggaran sehingga anggaran tersebut digunakan sesuai dengan sasaran dan lokus penelitian ini berada di Dinas Sosial Kota Palembang.

Adapun data terkait anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020

Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020				
No.	Program Pelayanan Dinas Sosial Kota Palembang	Anggaran pada Tahun 2020	Realisasi Anggaran pada Tahun 2020	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	924.179.785,00	776.332.142,00	84,00 %

Sumber : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 924.179.785,00 realisasi Rp 776.332.142 dengan tingkat penyerapan 84.00%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur termasuk ke dalam tingkat realisasi anggaran yang rendah. Hal tersebut dipengaruhi adanya kegiatan dengan realisasi anggaran yang belum optimal, yang mana akan dijelaskan pada table 1.2 di bawah ini. Berikut rincian anggaran dari kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Laporan Anggaran Perkegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020

Laporan Anggaran Perkegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020					
No.	Program	Kegiatan	Anggaran pada Tahun 2020	Realisasi Anggaran pada Tahun 2020	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor	147.750.000.00	0.00	0,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000.00	9.09.080.00	99,09%
		Pemeliharaan rutin/berkala	766.429.785.00	766.423.062.00	100,00%

Laporan Anggaran Perkegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020					
No.	Program	Kegiatan	Anggaran pada Tahun 2020	Realisasi Anggaran pada Tahun 2020	Persentase Realisasi Anggaran (%)
		kendaraan dinas/ operasional			
Total			924.179.785.00	776.332.142.00	84,00%

Sumber : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa laporan anggaran perkegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 924.179.785.00 dengan realisasi anggaran Rp 776.332.142.00 dan persentase 84,00%. Dari tabel di atas yang mempengaruhi rendahnya tingkat persentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dikarenakan pada kegiatan pembangunan gedung kantor tidak terrealisasikan dengan anggaran Rp 147.750.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 dan persentase 0,00%.

Berdasarkan latar belakang di atas memotivasi penulis untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang yang belum optimal. Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan referensi yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Rohani. (2010). *Pengelolaan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Assa, Christdyar M.D., Marlien Lapien &. Frans Singkoh. (2020). “Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2(5):1–12.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Fatimah, Fajar Nur'aini D. (2016). *Teknik Analisis SWOT*. Yogyakarta: Quadrant.
- Handoko, T. Hani. (2013). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Idrus, Muzakkir, Andi Rasjid Pananrangi, and Syamsul Bahri. (2020). “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pada Kepolisian Resort Mamasa.” *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3(1):65–73.
- Jordan Saputra, Sempo Alden Laloma &. Very Y. Londa. (2020). “Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado.” *Jurnal Administrasi Publik* 61–73.
- Listina, Lesa. (2021). “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Palembang Tahun 2018.”
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP, STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moenir, A. (1992). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ms, M Zahari, Surono Yunan &. Sufriyanto. (2022). “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sarana Prasarana Terhadap Motivasi Serta Dampaknya Pada Kinerja Anggota Polri Di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.” *J-Mas* 7(April):349–55. doi: 10.33087/jmas.v7i1.408.
- Munandar. (2007). *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja Dan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE.
- Pekei, Beni. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). " Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19."
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). “Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.”
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). “Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.”

- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). "Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah."
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah."
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). "Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa."
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan." 6(11).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). "Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima."
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). "Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Taa Kerja Dinas Sosial Kota Palembang."
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). "Surat Edaran Nomor:25/SE/BPKAD/2017 Entry Data Pada SIMDA BMD Oleh Pengguna Barang (OPD) Dan Laporan Bulanan Penambahan Dan Pengurangan Barang Milik Daerah."
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Pemerintah Republik Indonesia* (1):1–5.
- Rantung, Sarah Evangelista, Hendrik Manossoh, and Walandouw. (2022). "Evaluasi Pengelolaan Anggaran Khusus Kelurahan (AKK) Tahun 2019-2020 Khususnya Pengembangan Sarana Pra Sarana Di Kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara Evaluation Of Village Special Budget (AKK) for 2019-2020 Especially the D." 5(2):1–2.
- Renyowijoyo, Maindro. (2008). *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rismawati, Mita, and Said Achmad Kabiru Rafiie. (2022). "Analisis Sarana Dan Prasarana Dalam Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Johan Pahlawan." *Journal of Public Service* 2(1):67. doi: 10.35308/jps.v2i1.5176.
- Romas, M. Fahrul Aji. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2011). *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE.
- Terry, George R. dan Rue Leslie W. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yani, Ahmad. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.